

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pembangunan sebagai suatu proses berencana dari kondisi tertentu kepada kondisi yang lebih baik dapat dilakukan dengan berbagai pendekatan. Pembangunan tersebut bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan penduduk melalui pembangunan di segala bidang, termasuk di dalamnya adalah pembangunan di bidang ekonomi. Pembangunan ekonomi meliputi usaha suatu masyarakat untuk mengembangkan kegiatan ekonomi dan mempertinggi tingkat pendapatan masyarakat yang meliputi usaha pembangunan sosial, politik, dan kebudayaan. Maka pengertian pembangunan ekonomi adalah suatu proses yang menyebabkan pendapatan perkapita masyarakat meningkat dalam jangka panjang. (Sadono Sukirno, 1995:13).

Permasalahan pokok dalam pembangunan ekonomi adalah peningkatan *Gross Domestic Product* (GDP), pengurangan penghapusan kemiskinan dan kesenjangan pendapatan. Di beberapa negara tujuan tersebut kadang-kadang menjadi sebuah dilema antara mementingkan pertumbuhan ekonomi atau mengurangi kemiskinan (Deininger dan Olinto: 2000).

Kemiskinan terus menjadi masalah fenomena sepanjang sejarah Indonesia. Kemiskinan telah membuat jutaan anak-anak tidak bisa mengenyam pendidikan yang berkualitas, kesulitan membiayai kesehatan, kurangnya tabungan dan tidak ada investasi, kurangnya aksen ke pelayanan publik, kurangnya lapangan pekerjaan, kurangnya jaminan sosial dan perlindungan terhadap keluarga, menguatnya arus urbanisasi kekota, dan yang lebih parah kemiskinan menyebabkan jutaan rakyat memenuhi kebutuhan pangan, sandang dan papan secara terbatas.

Kemiskinan menyebabkan masyarakat desa rela mengorbankan apa saja demi keselamatan hidup, *safety life*, mempertaruhkan tenaga fisik untuk memproduksi keuntungan bagi tengkulak lokal dan menerima upah yang tidak sepadan dengan biaya tenaga yang dikeluarkan. Seperti para buruh tani yang bekerja sepanjang hari namun mendapat upah yang sangat sedikit. Kemiskinan telah membatasi hak rakyat untuk (1) memperoleh pekerjaan yang layak bagi kemanusiaan; (2) Hak rakyat untuk memperoleh perlindungan hukum; (3) Hak rakyat untuk memperoleh rasa aman; (4) Hak rakyat untuk memperoleh akses atas kebutuhan hidup (sandang, pangan, dan papan) yang terjangkau; (5) Hak rakyat untuk memperoleh akses atas pendidikan; (6) Hak rakyat untuk memperoleh akses atas kebutuhan kesehatan; (7) Hak rakyat untuk memperoleh keadilan; (8) Hak rakyat untuk berpartisipasi dalam mengambil keputusan publik dan pemerintahan; (9) Hak rakyat berinovasi; (10) Hak rakyat untuk berpartisipasi dalam menata dan mengelola pemerintahan dengan baik (Sahdan 2004).

Kemiskinan merupakan masalah multidimensi karena berkaitan dengan ketidakmampuan akses secara ekonomi, sosial, budaya, politik dan partisipasi dalam masyarakat. Kemiskinan juga memiliki arti yang lebih luas dari sekedar lebih rendahnya tingkat pendapatan atau konsumsi seseorang dari standar kesejahteraan terukur seperti kebutuhan kalori minimum atau garis kemiskinan. Akan tetapi kemiskinan memiliki arti yang lebih dalam karena berkaitan juga dengan ketidakmampuan untuk mencapai aspek diluar pendapatan (*non-income factors*) seperti akses kebutuhan minimum seperti kesehatan, pendidikan, air bersih dan sanitasi. Lebih lanjut kompleksitas dari kemiskinan bukan saja berhubungan dengan pengertian dan dimensinya saja tetapi juga berkaitan dengan metode pengukuran dan intervensi kebijakan yang diperlukan dalam mengentaskan masalah ini.

Program pengentasan kemiskinan secara langsung diimplementasikan oleh pemerintah Indonesia, baru pada awal tahun 1974-an. Pada tahun itu pemerintah merumuskan beberapa program yang ditujukan untuk membantu kantong-kantong (wilayah) kemiskinan dengan sasaran penduduk miskin. Sasaran wilayah merujuk kepada identifikasi wilayah-wilayah (desa/kecamatan) miskin/tertinggal. Pada periode tersebut dikenal dana bantuan pemerintah untuk pengentasan kemiskinan berupa Inpres Desa Tertinggal (IDT) yang dialokasikan untuk kantong-kantong kemiskinan (BPS, 2004). Upaya lainnya untuk mengentaskan kemiskinan juga diwujudkan dengan Inpres No.5 Tahun 1993, tentang peningkatan penanggulangan kemiskinan, sebagai program khusus mempercepat upaya mengatasi masalah kemiskinan yang diarahkan secara langsung pada penduduk miskin di desa tertinggal (Bappenas,1993).

Dengan menentukan sasaran pengeluaran pemerintah untuk penduduk miskin, pemerintah dapat membantu masalah dalam menghadapi kemiskinan (baik dari segi pendapatan maupun non-pendapatan). Pertama, pengeluaran pemerintah dapat digunakan untuk membantu mereka yang rentan terhadap kemiskinan dari segi pendapatan melalui suatu sistem perlindungan sosial modern yang meningkatkan kemampuan mereka sendiri untuk menghadapi ketidakpastian ekonomi. Kedua, pengeluaran pemerintah dapat digunakan untuk memperbaiki indikator-indikator pembangunan manusia, sehingga dapat mengatasi kemiskinan dari aspek non-pendapatan. Menciptakan pengeluaran pemerintah yang bermanfaat bagi penduduk miskin sangat menentukan saat ini, terutama mengingat adanya peluang dari sisi fiskal yang ada di Indonesia pada saat ini.

Pemerintah pusat telah menganggarkan subsidi pembangunan kepada pemerintah daerah sebagai salah satu komponen dalam penghapusan kemiskinan yang didalamnya banyak terdapat program-program pemerintah yang dicanangkan khusus untuk pengurangan kemiskinan seperti dana bantuan untuk pendidikan (BOS), Bantuan Langsung Tunai (BLT), Raskin, Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM), Program Pengembangan Kecamatan (PPK), Kredit Usaha Rakyat (KUR), maupun subsidi harga seperti subsidi BBM dan bantuan pada sektor kesehatan seperti Jamkesmas. Program-program pemerintah ini merupakan bentuk subsidi pembangunan, baik dari segi harga maupun subsidi dalam bentuk barang atau uang.

Provinsi Lampung dengan luas wilayah 35.288,35 km² dan jumlah penduduknya mencapai 7.391.128 jiwa (Badan Pusat Statistik : 2010) merupakan bagian dari wilayah Indonesia yang terletak di ujung Selatan pulau Sumatera. Pertumbuhan ekonomi Provinsi Lampung telah bangkit kembali sejak tahun 2001 setelah sempat terpuruk pada tahun 1998, di mana pertumbuhan ekonomi sebesar minus 6,95 persen. Tingkat pertumbuhan ekonomi merupakan indikator yang dapat menunjukkan perubahan kinerja ekonomi wilayah. Dengan tingkat pertumbuhan yang cukup tinggi diharapkan produktifitas dan pendapatan masyarakat akan meningkat melalui penciptaan lapangan kerja dan kesempatan kerja. Laju pertumbuhan ekonomi sektoral Provinsi Lampung dapat dilihat pada tabel 1 dibawah ini.

Tabel 1. Laju Pertumbuhan Ekonomi Sektoral Provinsi Lampung Periode 2000-2009.

Tahun	Laju Pertumbuhan (%)
2000	3,9
2001	4,4
2002	4,6
2003	4,9
2004	5,1
2005	5,1
2006	5,4
2007	5,5
2008	5,8
2009	5,9

Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi Lampung.

Dalam kurun waktu 2000-2009 kondisi pertumbuhan ekonomi Lampung berfluktuasi pada kisaran 3,9 s.d 5,9 persen. Laju pertumbuhan tertinggi terjadi pada tahun 2009 (5,9 persen), sedangkan yang terendah terjadi pada tahun 2000 hal ini disebabkan karena masih adanya pengaruh dari krisis moneter pada tahun

1999. Pertumbuhan Ekonomi Sektoral Lampung tidak mengalami peningkatan pada tahun 2005 yaitu tetap pada angka pertumbuhan 5,1 persen, hal ini disebabkan naiknya harga BBM yang naik dua kali pada tahun 2005. Setelah melambat pada tahun 2005, berturut-turut ditahun 2006, 2007, 2008, dan 2009 perekonomian Lampung mengalami percepatan dengan tumbuh sebesar 5,4 persen, 5,5 persen, 5,8 persen dan 5,9 persen. Kenaikan laju pertumbuhan ekonomi ini dapat meningkatkan aktifitas ekonomi yang diimbangi dengan naiknya tingkat pendapatan perkapita yang akan memberikan pengaruh terhadap pengurangan kemiskinan di Provinsi Lampung.

Namun ironisnya Provinsi Lampung merupakan salah satu provinsi yang mempunyai tingkat kemiskinan dan kesenjangan pendapatan yang sangat tinggi di tanah air walaupun laju pertumbuhan ekonomi cenderung mengalami kenaikan. Pada tahun 2005 lalu, provinsi ini merupakan provinsi dengan Indeks Gini tertinggi ketiga di Indonesia. Sehingga Provinsi Lampung merupakan Provinsi termiskin kedelapan di Indonesia. Selain itu, Lampung juga merupakan provinsi dengan persentase dan jumlah penduduk miskin terbesar kedua di Pulau Sumatera, yaitu 20,93 persen atau 1,60 juta jiwa.

Jumlah dan persentase penduduk miskin pada periode 2000-2009 berfluktuasi dari tahun ke tahun meskipun ada kecenderungan menurun. Pada periode 2000-2009 jumlah penduduk miskin cenderung menurun dari 2.017,8 ribu pada tahun 2000 menjadi 1.558,3 ribu pada tahun 2009. Secara relatif juga terjadi penurunan persentase penduduk miskin dari 30,43 persen tahun 2000 menjadi 21,20 persen tahun 2009.

Tabel 2. Jumlah dan Persentase Penduduk Miskin di Provinsi Lampung Menurut Daerah Tahun 2000-2009.

Tahun	Jumlah Penduduk Miskin (Ribu)			Persentase Penduduk Miskin		
	Kota	Desa	Kota+Desa	Kota	Desa	Kota+Desa
2000	381,2	1.636,6	2.017,8	27,71	31,14	30,43
2001	244,4	1.429,7	1.674,1	16,69	27,20	24,91
2002	345,1	1.305,6	1.650,7	22,42	24,53	24,05
2003	318,7	1.249,3	1.568,0	21,36	22,98	22,63
2004	317,3	1.244,4	1.561,7	20,17	22,81	22,22
2005	405,5	1.167,0	1.572,6	20,46	21,78	22,09
2006	398,6	1.239,4	1.638,0	20,35	23,67	22,71
2007	366,0	1.295,7	1.661,7	18,11	23,70	22,79
2008	365,6	1.226,0	1.591,6	17,85	22,14	21,53
2009	349,3	1.209,0	1.558,3	16,78	21,49	21,20

Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi Lampung

Selama periode Maret 2008 - Maret 2009, penduduk miskin di daerah perkotaan berkurang 16,25 ribu orang (5,99 persen) dari 365,56 ribu pada Maret 2008 menjadi 349,31 ribu orang pada Maret 2009, sementara di daerah perdesaan berkurang sebanyak 17,06 ribu orang (2,94 persen) dari 1.226,3 ribu orang pada Maret 2008 menjadi 1.208,97 pada Maret 2009. Garis Kemiskinan naik sebesar 9,56 persen, yaitu dari Rp.172.332,- per kapita per bulan pada Maret 2008 menjadi Rp. 188.812,- per kapita per bulan pada Maret 2009.

Jumlah penduduk miskin di Provinsi Lampung Maret 2009 sebesar 1.558,3 ribu orang (20,22 persen). Dibandingkan dengan penduduk miskin Maret 2008 yang berjumlah 1.591,6 ribu orang (20,98 persen), berarti jumlah penduduk miskin berkurang 2,09 persen atau 33,3 ribu orang. Persentase penduduk miskin antara daerah perkotaan dan perdesaan tidak banyak berubah. Pada Maret 2008, 77,03 persen penduduk miskin tinggal di daerah perdesaan, sementara pada Maret 2009 persentase ini menjadi 77,58 persen.

Tabel 3. Garis Kemiskinan Provinsi Lampung Periode 2007-2009

Daerah	Garis Kemiskinan (Rp/Kapita/Bulan)		
	2007	2008	2009
Perkotaan	187.923	203.685	224.168
Pedesaan	145.634	160.734	175.734
Kota+Desa	157.052	172.332	188.812

Sumber: Badan
Pusat Statistik
Lampung

Selama Maret 2008 - Maret 2009, Garis Kemiskinan naik sebesar 9,56 persen, yaitu dari Rp.172.332,- per kapita per bulan pada Maret 2008 menjadi Rp. 188.812,- per kapita per bulan pada Maret 2009.

Berbagai upaya penanggulangan kemiskinan yang telah diambil pemerintah berfokus pada: (1) peningkatan pertumbuhan ekonomi yang berkualitas melalui upaya padat karya, perdagangan ekspor serta pengembangan UMKM, (2) peningkatan akses terhadap kebutuhan dasar seperti pendidikan dan kesehatan (KB, kesejahteraan ibu, infrastruktur dasar, pangan dan gizi), (3) pemberdayaan masyarakat lewat Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) yang bertujuan untuk membuka kesempatan berpartisipasi bagi masyarakat miskin dalam proses pembangunan dan meningkatkan peluang dan posisi tawar masyarakat miskin, (4) peningkatan pertumbuhan ekonomi yang berkualitas melalui pendidikan seperti Dana Bantuan BOS dan wajib belajar 9 tahun, serta (5) perbaikan sistem bantuan dan jaminan sosial lewat Program Keluarga Harapan (PKH). Beberapa proyek pemberdayaan masyarakat lainnya.

Pos pengeluaran paling besar untuk pemerintah daerah adalah untuk pengeluaran konsumsi pemerintah yaitu penyelenggaraan administrasi pemerintahan, lalu diikuti oleh sektor pendidikan. Pengeluaran untuk administrasi pemerintahan terutama paling banyak terjadi di tingkat provinsi (38 persen dari total pengeluaran) dan tingkat kabupaten/kota (30 persen). Ini sangat bertolak belakang dengan apa yang dijumpai dalam ekonomi yang lebih modern, yang biasanya mengalokasikan 5 persen atau lebih kecil dari anggaran mereka untuk pengeluaran-pengeluaran serupa.

Pos-pos terbesar dalam administrasi pemerintahan meliputi pengeluaran untuk pembayaran gaji dan tunjangan untuk pegawai bagi kepala daerah beserta staf, anggota DPRD, dan rehabilitasi dan pembangunan gedung-gedung pemerintah. Pemerintah daerah mengharapkan dengan meningkatkan pengeluaran di bidang administrasi daerah akan meningkatkan produktifitas tenaga kerja pemerintahan daerah yang akan mendorong pengurangan kemiskinan.

Peningkatan belanja pegawai diharapkan akan menyebabkan kenaikan produksi yang diukur dengan PDB dan PDRB serta kenaikan belanja barang dan jasa diharapkan memberikan dampak positif terhadap peningkatan produksi nasional dan provinsi. Peningkatan belanja barang dan jasa juga akan mendorong penyerapan tenaga kerja di masing-masing sektor. Sektor industri pengolahan merupakan sektor yang paling banyak menyerap tenaga kerja. Dari segi wilayah, dampak dari kenaikan belanja barang dan jasa tersebut akan bervariasi pada setiap kabupaten dan kota di Provinsi Lampung, tergantung dari sektor manakah

kabupaten atau kota tersebut yang lebih ditingkatkan. Pengeluaran konsumsi pemerintah Lampung periode 2000-2009 dapat dilihat pada tabel 4 dibawah ini.

Tabel 4. Pengeluaran Konsumsi Pemerintah Lampung Periode 2000-2009.

Tahun	Pengeluaran Konsumsi Pemerintah (triliun Rp)
2000	2.3
2001	3.0
2002	3.4
2003	3.7
2004	3.9
2005	4.0
2006	4.2
2007	4.6
2008	4.7
2009	5.0

Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi Lampung.

Pengeluaran konsumsi pemerintah mengalami peningkatan setiap tahunnya pada periode 2000-2009 yakni dari 2,3 trilliun pada tahun 2000 menjadi 5,0 trilliun pada tahun 2009. Untuk wilayah yang sedang berkembang, besarnya nilai pengeluaran konsumsi pemerintah sangat berpengaruh terhadap kemajuan perekonomian di wilayah bersangkutan. Pengeluaran pemerintah diberbagai sektor ekonomi akan menggerakkan kegiatan ekonomi.

Seiring dengan berakhirnya tahun anggaran 2009, konsumsi pemerintah mengalami akselerasi dibandingkan periode sebelumnya. Sesuai *trend*-nya, konsumsi pemerintah mengalami masa puncak realisasi anggaran pada triwulan IV. Pada triwulan laporan, konsumsi pemerintah dalam pembentukan PDRB tumbuh sebesar 28,18% (qtq), mengalami peningkatan bila dibandingkan dengan triwulan lalu yang tumbuh sebesar 22,42% (qtq).

Kebijakan pemerintah yang berorientasi terhadap pertumbuhan pembangunan diharapkan akan memberikan dampak terhadap perubahan ekonomi menjadi lebih baik diberbagai sektor, karena pertumbuhan ekonomi akan mencerminkan adanya peningkatan dari perekonomian yang buruk kedalam perekonomian yang lebih baik dengan adanya peningkatan pendapatan perkapita maupun pendapatan dari sektor PDRB.

Dana pemerintah harus dapat diarahkan secara lebih baik. Sementara pendekatan pembangunan berbasis masyarakat akan memungkinkan penanganan kerentanan dengan fokus yang luas, yang juga penting adalah mengarahkan pengeluaran pemerintah pada kelompok termiskin yang tertinggal dari sisi non-pendapatan, mengingat aspek multidimensi kemiskinan.

Hanya melalui pengeluaran pemerintah yang lebih terarah dan efektif, maka pemerintah mampu mencapai kemajuan pada indikator-indikator pembangunan manusia. Secara spesifik, pemerintah perlu terus mencoba untuk mengarahkan upaya transfer kepada penduduk miskin. Hal ini dapat dilakukan melalui bantuan tunai bersyarat (BTB) yang ditujukan kepada layanan berkualitas pada bidang yang paling dibutuhkan.

Pengeluaran pemerintah juga bisa menjadi instrumen yang tepat untuk menyikapi ketimpangan antarwilayah dalam hal kemiskinan, baik dari dimensi pendapatan maupun nonpendapatan. Perlu dibuat sistem transfer dari pusat ke daerah yang lebih berpihak kepada masyarakat miskin, serta membangun kemampuan dan menciptakan insentif bagi pemerintah daerah untuk meningkatkan perhatian mereka terhadap pelaksanaan kebijakan yang berpihak kepada penduduk miskin.

Teori ekonomi menyatakan bahwa pengeluaran pemerintah dan pertumbuhan ekonomi akan menurunkan tingkat kemiskinan, yang menunjukkan semakin banyaknya output nasional yang menyebabkan kenaikan pendapatan perkapita, mengindikasikan semakin banyaknya tenaga kerja karena kenaikan jumlah penduduk sehingga seharusnya akan mengurangi kemiskinan dan pengangguran akan tetapi mengapa pertumbuhan ekonomi meningkat namun angka kemiskinan di Provinsi Lampung masih relatif tinggi.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, maka permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini adalah:

1. Apakah Pengeluaran Konsumsi Pemerintah berpengaruh terhadap Tingkat Kemiskinan di Provinsi Lampung periode 2000-2009?
2. Apakah Pertumbuhan Ekonomi berpengaruh terhadap Tingkat Kemiskinan di Provinsi Lampung periode 2000-2009?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah untuk:

1. Mengetahui apakah Pengeluaran Konsumsi Pemerintah berpengaruh terhadap Tingkat Kemiskinan di Provinsi Lampung periode 2000-2009.
2. Mengetahui apakah Pertumbuhan Ekonomi berpengaruh terhadap Tingkat Kemiskinan di Provinsi Lampung periode 2000-2009.
3. Untuk mengetahui elastisitas variabel pengeluaran konsumsi pemerintah dan pertumbuhan ekonomi terhadap variabel tingkat kemiskinan.

D. Kerangka Pemikiran

Goudy dan Ladd (1999) menyebutkan ada tingkat kesepakatan dan konsensus terhadap hubungan-hubungan antara pertumbuhan ekonomi, kemiskinan dan ketimpangan. Pertama, hubungan itu menggambarkan bahwa pertumbuhan ekonomi mengurangi kemiskinan. Hal ini tergantung pada sampai sejauh mana keadilan dalam distribusi pendapatan di suatu masyarakat. Kedua, pertumbuhan ekonomi tidak memiliki pengaruh yang bisa diprediksi atas ketimpangan di negara-negara berkembang. Ketiga, tingkat keadilan dalam suatu masyarakat adalah salah satu determinan dari pertumbuhan ekonomi.

Kuznets juga menyebutkan di mana hubungan antara kemiskinan dan pertumbuhan ekonomi menunjukkan hubungan negatif, sebaliknya hubungan pertumbuhan ekonomi dan tingkat kesenjangan ekonomi adalah hubungan positif. Hubungan ini sangat terkenal dengan nama *kurva U terbalik kuznets*. Kuznets menyimpulkan bahwa pola hubungan yang positif kemudian menjadi negatif, menunjukkan terjadi proses evolusi dari distribusi pendapatan dari masa transisi suatu ekonomi pedesaan (*rural*) ke suatu ekonomi perkotaan (*urban*) atau ekonomi industri.

Dengan melihat sejarah penanggulangan kemiskinan yang telah dilakukan pemerintah maka dapat ditentukan bahwa strategi pengentasan kemiskinan yang efektif terdiri dari tiga komponen yaitu:

1. Membuat Pengeluaran Pemerintah Bermanfaat bagi Rakyat Miskin. Dengan menentukan sasaran pengeluaran untuk rakyat miskin, pemerintah dapat

membantu mereka dalam menghadapi kemiskinan (baik dari segi pendapatan maupun non-pendapatan).

2. Membuat Pertumbuhan Ekonomi Bermanfaat bagi Rakyat Miskin.

Pertumbuhan ekonomi telah dan akan tetap menjadi landasan bagi pengentasan kemiskinan karena akan mengaitkan masyarakat miskin dengan proses pertumbuhan baik dalam konteks wilayah dan pertumbuhan ekonomi akan meningkatkan pendapatan masyarakat.

3. Membuat Layanan Sosial Bermanfaat Bagi Rakyat Miskin. Penyediaan layanan sosial bagi rakyat miskin baik oleh sektor pemerintah ataupun sektor swasta adalah mutlak dalam penanganan kemiskinan.

Pemerintah telah banyak mengeluarkan biaya dalam penanggulangan kemiskinan, baik dana yang didapat dari pemerintah pusat maupun yang didapat dari APBD. Pengeluaran pemerintah terbesar berada dalam pembiayaan administrasi pemerintahan (pengeluaran konsumsi pemerintah).

Pengeluaran konsumsi pemerintah digunakan untuk membiayai belanja pegawai, tunjangan, belanja barang seperti pengeluaran untuk pembelian barang dan jasa dalam penyelenggaraan pertahanan, kesehatan, pendidikan, biaya pemeliharaan, dan pengeluaran lain yang bersifat rutin. Selain itu Provinsi Lampung bila dilihat dari Pertumbuhan Ekonomi yang cenderung mengalami peningkatan seharusnya dapat mengurangi tingkat kemiskinan secara makro, dimana pertumbuhan ekonomi akan meningkatkan pendapatan perkapita karena meningkatnya kesempatan kerja.

Namun ironisnya dengan pengeluaran konsumsi pemerintah yang terus meningkat dan pertumbuhan ekonomi yang cenderung meningkat ternyata Provinsi Lampung merupakan provinsi termiskin ke-2 se-Sumatera dan menduduki peringkat ke-8 se-Indonesia. Meskipun pada tahun 2004 persentase penduduk Lampung yang hidup di bawah garis kemiskinan lebih rendah dari penduduk Bengkulu, tapi Provinsi Lampung tetap dipandang sebagai salah satu provinsi termiskin di Indonesia (Siswoyo dalam Lampung Post, 2007).

Upaya pemerintah dalam mengurangi kemiskinan pun harus berpengaruh terhadap kemiskinan. Dengan diberikannya Program-Program bantuan untuk masyarakat yang bertujuan untuk meningkatkan pembangunan ekonomi yang kemudian akan berpengaruh terhadap pengurangan tingkat kemiskinan di Provinsi Lampung.

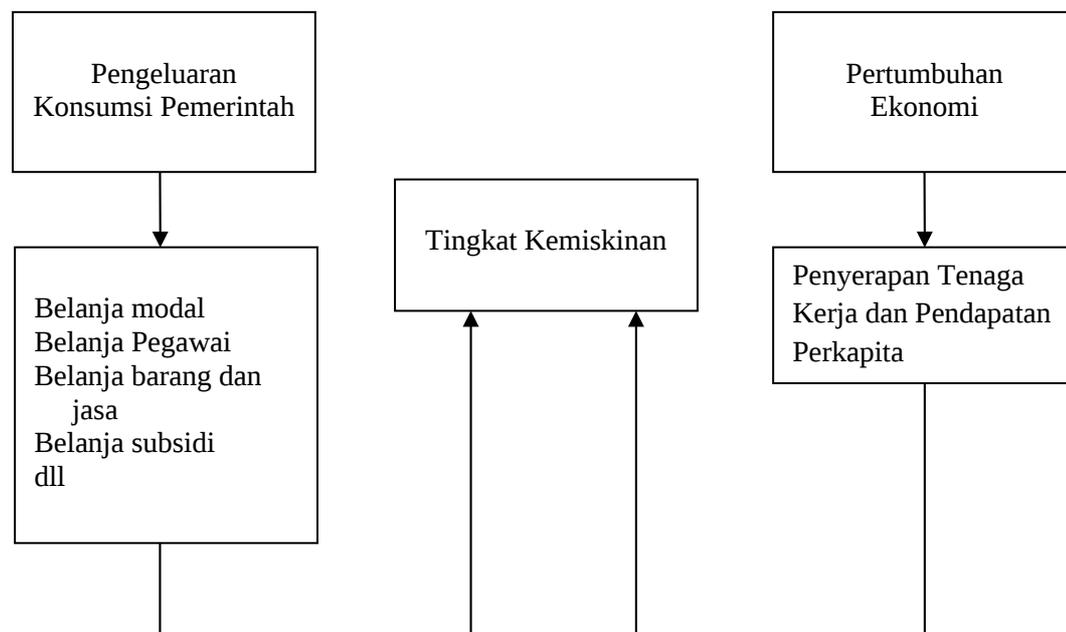
Sementara itu pendanaan untuk penganggulangan kemiskinan selalu meningkat dari tahun ke tahun. Namun demikian mekanisme penyaluran dana tersebut masih tersebar diberbagai departemen atau lembaga pemerintah nondepartemen.

Implikasinya adalah dalam pelaksanaan seringkali keterkaitan antar program penganggulangan kemiskinan di pusat maupun daerah belum optimal.

Kapasitas pemerintah daerah yang tidak merata menjadi salah satu kendala bagi upaya penanggulangan kemiskinan. Sekitar sepertiga dari total pengeluaran pemerintah dialokasikan dan dibelanjakan di tingkat kabupaten. Di satu sisi hal ini merupakan indikator bahwa desentralisasi telah terlaksana, tapi masalahnya adalah banyak pemerintah daerah menghadapi kesulitan di bidang perencanaan, penganggaran dan pelaksanaan pembelanjaan tersebut. Salah satu indikasi kesulitan-kesulitan tersebut ialah meningkatnya surplus pemerintah daerah yang

terlihat pada tahun tahun terakhir. Oleh karena itu, diperlukan upaya terpadu untuk memperbaiki kapasitas pemerintah daerah (dan PNS yang bekerja untuk mereka), untuk merencanakan, menganggarkan dan melaksanakan program-program pelayanan dan penanggulangan kemiskinan.

Gambar 1. Bagan Kerangka Pemikiran



E. Hipotesis

Berdasar pada uraian sebelumnya, maka hipotesis yang diajukan dalam penelitian ini adalah:

1. Diduga bahwa Pengeluaran Konsumsi Pemerintah berpengaruh negatif terhadap Tingkat Kemiskinan di Provinsi Lampung Periode 2000-2009.
2. Diduga bahwa Pertumbuhan Ekonomi berpengaruh negatif terhadap Tingkat Kemiskinan Provinsi Lampung Periode 2000-2009.

F. Sistematika Penulisan

Sistematika dalam penulisan skripsi ini terdiri dari:

- Bab I : Pendahuluan, meliputi Latar Belakang, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Kerangka Pemikiran, Hipotesis, dan Sistematika Penulisan.
- Bab II : Tinjauan Pustaka, mencakup tentang teori-teori yang menjadi landasan atau acuan dalam penelitian ini.
- Bab III : Metode Penelitian, meliputi Jenis dan Sumber Data, Batasan Peubah Variabel, Alat Analisis, Elastisitas, Uji Asumsi Klasik, Pengujian Hipotesis.
- Bab IV : Hasil dan Pembahasan, membahas uraian tentang hasil perhitungan serta mengimplikasinya.
- Bab V : Simpulan dan Saran, menyajikan kesimpulan dan saran dari penulis yang didasarkan dari hasil penelitian yang diperoleh.

Daftar Pustaka

Lampiran